

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya dalam pasal 4 dikatakan pula bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa pengertian laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:

- a. Pemerintah pusat
- b. Pemerintah daerah
- c. Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat

Suatu organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyampaikan laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan medium dalam menyampaikan informasi yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu daerah dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan pada dasarnya merupakan asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menginformasikan kepada pihak lain, yaitu para pemangku kepentingan (*stakeholder*), tentang kondisi keuangan pemerintah (Komarasari, 2017).

2.1.1.1 Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah (Mardiasmo, 2009):

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*compliance and stewardship*)

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan

sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*accountability and retrospective reporting*)

Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada. Laporan keuangan juga memungkinkan pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima, serta memungkinkan bagi mereka untuk menilai efisiensi dan efektivitas pengguna sumber daya organisasi.

3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*planning and authorization information*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang.

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

4. Kelangsungan organisasi (*viability*)

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.

5. Hubungan Masyarakat (*public relation*)

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah

- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan laporan keuangan sektor publik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan. Untuk memberikan jaminan kepada pengguna laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan. Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati *trend* antar kurun waktu pencapaian atas tujuan yang telah ditetapkan, dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis. Untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Untuk membantu pembaca dalam

menentukan apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang. Untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat serta berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi sektor publik secara lebih mendalam.

2.1.1.2 Komponen Laporan Keuangan Sektor Publik

Komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berikut (PP No. 71 Tahun 2010):

1. **Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat maupun daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam satu periode

pelaporan. Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: (a) Saldo Anggaran Lebih Awal; (b) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; (c) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan; (d) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun sebelumnya; (e) Lain-Lain; (f) Saldo Anggaran Lebih Akhir. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Masing-masing unsur dijelaskan sebagai berikut:

- a) Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa depan diharapkan dapat

diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

4. Laporan Operasional

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan finansial mencakup laporan operasional yang menyajikan pos-pos sebagai berikut: (a) Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; (b) Beban dari kegiatan operasional; (c) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, bila ada; (d) Pos luar biasa, bila ada; (e) Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos sebagai berikut: (a) Ekuitas Awal; (b) Surplus/defisit-LO; (c) Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; (d) Ekuitas Akhir.

7. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang

diharuskan dan dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Menurut Bastian (2010) komponen laporan keuangan sektor publik meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Laporan posisi keuangan atau yang disebut juga dengan neraca atau laporan aktiva dan kewajiban, adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, utang dan modal pemilik selama satu periode tertentu. Secara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos sebagai berikut:

- a) Properti, pabrik dan peralatan
- b) Aktiva tidak berwujud
- c) Aktiva keuangan (selain butir d, f, dan h)
- d) Investasi yang diperlakukan dengan metode ekuitas
- e) Persediaan
- f) Pemulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer
- g) Piutang dari transaksi pertukaran
- h) Kas dan setara kas
- i) Utang pajak dan transfer

- j) Utang karena transaksi pertukaran
- k) Cadangan (*provision*)
- l) Kewajiban tidak lancar
- m) Partisipasi minoritas
- n) Aktiva/ekuitas neto

2. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus–Defisit)

Laporan kinerja keuangan atau yang disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus–rugi, laporan operasi, laporan surplus–defisit atau laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu. Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos berikut:

- a) Pendapatan dari aktivitas operasi
- b) Surplus atau defisit dari aktivitas operasi
- c) Biaya keuangan (biaya pinjaman)
- d) Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan *joint venture* yang menggunakan metode ekuitas
- e) Surplus atau defisit dari aktivitas biasa
- f) Pos-pos luar biasa
- g) Saham partisipasi minoritas dari surplus atau defisit neto
- h) Surplus atau defisit neto untuk periode

3. Laporan Perubahan Aktiva /Ekuitas Neto

Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto menggambarkan kenaikan atau penurunan kekayaan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan ekuitas neto secara keseluruhan menyajikan total surplus/defisit neto selama satu periode tertentu. Pendapatan dan biaya lainnya diakui secara langsung sebagai perubahan aktiva/ekuitas neto dari setiap kontribusi dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik. Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto meliputi:

- a) Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik
- b) Saldo akumulasi surplus dan defisit pada awal periode, pada tanggal pelaporan, dan pergerakan selama periode
- c) Pengungkapan komponen asset/ekuitas neto secara terpisah dan rekonsiliasi antara nilai tercatat setiap komponen asset/ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pembiayaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas sangat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan karena menyediakan dasar estimasi kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, serta kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.

5. Catatan atas Laporan Keuangan Sektor Publik

Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Catatan atas laporan keuangan bertujuan untuk menginformasikan pengungkapan yang diperlukan atas laporan keuangan.

Dari beberapa referensi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komponen laporan keuangan sektor publik meliputi laporan realisasi anggaran yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan perubahan saldo anggaran lebih yang menyajikan pos-pos saldo anggaran lebih awal, penggunaan

saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, saldo anggaran lebih akhir dan lain-lain secara komparatif dengan periode sebelumnya. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Laporan operasional, kegiatan operasional lembaga publik dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir. Catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.

2.1.1.3 Nilai Informasi Laporan Keuangan

Menurut Suwardjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Suwardjono (2005) agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat jika informasi tersebut dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta akan bermanfaat jika pemakai mempercayai informasi tersebut. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai.

Sehingga supaya informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan.

2.1.1.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Sektor Publik

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Adapun

karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010):

1. Relevan, yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan memiliki unsur-unsur berikut:
 - a. Manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
 - b. Manfaat prediktif (*predictive value*). Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
 - c. Tepat waktu (*timeliness*). Informasi yang disajikan secara tepat waktu dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
 - d. Lengkap, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan

keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:
 - a. Penyajian yang jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
 - c. Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
3. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode

sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

4. Dapat dipahami, Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Ariesta, 2013).

Berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi dan informasi disajikan tepat waktu dan lengkap. Andal, informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Dapat dibandingkan, informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain. Dapat dipahami, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

2.1.1.5 Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Suwardjono (2005), pelaporan keuangan adalah struktur dan proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomik dan sosial negara. Sedangkan menurut FASB dalam *Statement of Financial Accounting Concepts* mengartikan pelaporan keuangan sebagai sistem dan sarana penyampaian informasi tentang segala kondisi dan kinerja perusahaan terutama dari segi keuangan dan tidak terbatas pada apa yang dapat disampaikan melalui pernyataan keuangan diatas.

Pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah struktur dan proses meliputi segala aspek yang berkaitan dengan bagaimana penyediaan, pelaporan dan penyampaian informasi keuangan suatu pemerintahan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan yang akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial (Suwardjono, 2015). Aspek-aspek tersebut antara lain lembaga yang terlibat, peraturan yang berlaku termasuk PABU, dan mekanisme penyampaian informasi.

Dalam PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Bagian KKAP paragraf 24 disebutkan laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi

yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah sebagai entitas pelayanan publik juga perlu mempertanggungjawabkan anggaran dan kinerjanya. Bentuk utama dari pertanggungjawaban tersebut adalah penyajian laporan keuangan daerah. Selanjutnya pada KKAP paragraf 60 disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran (*budgetary reports*), Laporan Finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk memenuhi tujuan penyajian laporan keuangan, maka laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dengan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagai ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi pemerintah.

2.1.2 Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah

PP No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan menyebutkan bahwa keterandalan pelaporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan

Menurut Ariesta (2008), Andal merupakan informasi dalam laporan keuangan yang bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang jujur, dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik berikut:

- a) Penyajian jujur. Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b) Dapat diverifikasi (*verifiability*). Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Informasi yang bermanfaat bagi pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai, termasuk laporan keuangan. Hal itu agar informasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Kualitas nilai informasi laporan keuangan sangatlah penting salah satunya diukur dengan keterandalan merupakan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah (Komarasari, 2017).

Dapat disimpulkan keterandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan kepada pengguna laporan keuangan bahwa informasi tersebut benar dan valid. Sehingga supaya bermanfaat pelaporan keuangan pemerintah daerah harus memiliki keterandalan, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang jujur, dapat diverifikasi dan netral.

2.1.3 Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional, sumber daya manusia mencakup tiga aspek, yaitu pendidikan, pengalaman, dan pelatihan. Sumber daya manusia harus baik karena sumber daya yang baik akan menunjukkan kapasitas sumber daya manusia yang baik pula. Manusia bertanggungjawab untuk mengelola organisasi, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan elemen penting dan selalu ada dalam organisasi (Komarasari, 2017).

Sumber daya manusia merupakan kemampuan baik dalam tingkatan individu, organisasi atau kelembagaan, maupun sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Sari dan Witono, 2014).

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem yang digunakan untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Komarasari, 2017).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan individu, suatu organisasi atau suatu lembaga yang melaksanakan fungsi sebagai penggerak organisasi atau institusi. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam organisasi menggunakan bekal Pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien.

2.1.3.1 Indikator Kapasitas Sumber Daya Manusia

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono dan Fidelis (2004), untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggungjawab dapat dilihat dalam deskripsi

jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan dan dari keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*ability*) untuk melaksanakan suatu pekerjaan (Ariesta, 2013). Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Perubahan perundang-undangan maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah juga sumber daya manusia yang responsif. Artinya, dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah dibutuhkan pegawai dengan pengetahuan yang cukup dalam bekerja, sehingga tidak akan menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga (Winidyaningrum dan Rahmawati, 2010).

Menurut Andrianto (2017), kapasitas sumber daya manusia dapat diukur melalui:

1) Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia. Pendidikan merupakan proses sistematis mengubah tingkah laku seseorang untuk mencapai tujuan organisasi. Pendidikan dapat dibagi menjadi: (a) pendidikan formal, (b) Pendidikan informal, (c) Pendidikan non formal.

2) Pelatihan

Pelatihan yang baik harus berkaitan dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan adalah suatu usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggungjawabnya.

3) Pengalaman

Pengalaman dapat dilihat dari lamanya seseorang bekerja. Dengan pengalaman, seseorang akan terbiasa melakukan suatu pekerjaan dan mempunyai wawasan yang luas serta mudah beradaptasi dengan lingkungan.

Menurut (Alimbudiono, Sandra dan Fidelis, 2004), untuk menilai kapasitas dan kualitas sumber daya manusia dalam menjalankan suatu fungsi, termasuk akuntansi dapat dilihat dari:

1) Tanggungjawab

Tanggungjawab dapat dilihat atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas. Tanggungjawab yang baik adalah dapat memahami dan menjalankan tugas sesuai dengan deskripsi jabatan.

2) Kompetensi sumber daya manusia

Kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Berdasarkan uraian diatas, indikator kapasitas sumber daya manusia yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) latar belakang Pendidikan, (2) pelatihan, (3) pengalaman dan (4) tanggungjawab.

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi merupakan teknologi yang mempunyai kemampuan untuk menangkap (*capture*), menyimpan (*store*), mengolah (*process*), mengambil kembali (*retrieve*) dan menyebarkan (*transmit*) informasi dan sebagai sarana dalam meningkatkan kinerja baik pemerintahan maupun perusahaan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi tersebut (Wansyah, dkk. 2012). Pengelolaan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan transaksi elektronik,

mempunyai peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan percepatan pelaksanaan *e-government* (Komarasari, 2017). Perubahan dalam pola penyusunan laporan keuangan daerah yang awalnya secara manual dilihat tidak efektif, efisien dan untuk nilai keandalan suatu laporan keuangan masih kurang keakuratannya karena penyusunan laporan keuangan secara manual lebih besar resiko terjadi kesalahan, oleh karena itu pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan (Primayana, dkk. 2014).

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan tingkat integritas teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi. Secara umum menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat ditinjau dari: (a) pemanfaatan perangkat (kelengkapan yang mendukung terlaksananya penggunaan teknologi informasi meliputi perangkat lunak, keras dan sistem jaringan); (b) pemrosesan dan penyimpanan (pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan data keuangan serta sistematis dan menyeluruh); dan (c) perawatan (adanya jadwal pemeliharaan peralatan perangkat teknologi informasi secara teratur guna mendukung kelancaran pekerjaan) (Sari dan Witono, 2014).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah kegiatan memanfaatkan seperangkat alat yang digunakan manusia untuk membantu memproses informasi, menyimpan dan kemudian mengkomunikasikan atau menyampaikan informasi.

2.1.4.1 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Sukirman (2012) dalam Ariesta (2013), indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki perangkat komputer
- 2) Memiliki dan memanfaatkan jaringan internet
- 3) Mengadakan proses akuntansi yang terkomputerisasi
- 4) Menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 5) Adanya laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
- 6) Adanya pemeliharaan peralatan
- 7) Adanya perbaikan peralatan yang rusak

Berdasarkan uraian diatas, indikator pemanfaatan teknologi informasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, (1) kecukupan jumlah komputer yang tersedia, (2) jaringan internet sudah dipasang dan dimanfaatkan sesuai ketentuan, (3) proses akuntansi dilakukan secara terkomputerisasi, (4) adanya *software* pendukung dan (5) adanya jadwal pemeliharaan peralatan.

2.1.5 Pengendalian Internal Akuntansi

Pengendalian Internal menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya perundang-undangan. Ada tiga fungsi yang terlihat dari definisi tersebut yaitu:

- a) Keterandalan pelaporan keuangan
- b) Efisiensi dan efektivitas operasi
- c) Kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Fungsi pertama dilakukan untuk mencegah terjadinya inefisiensi dan dinamakan fungsi kedua dan ketiga dilakukan secara khusus untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dan dinamakan pengendalian intern administratif (Andrianto, 2017).

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keterandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Pengendalian internal akuntansi merupakan rencana organisasi dan metode yang bertujuan untuk mengamankan aset yang ada pada organisasi tersebut, serta menguji sejauh mana data akuntansi dapat dipercaya. Pengendalian internal digunakan untuk memberikan petunjuk tentang bagaimana suatu dikerjakan dan mendorong ditaatinya kebijakan pimpinan yang sudah ditetapkan. Pengendalian internal tidak digunakan untuk menghilangkan peluang terjadinya kesalahan dan kecurangan, tetapi dengan adanya pengendalian internal yang baik akan menekan resiko terjadinya hal tersebut sehingga dapat segera diketahui dan diatasi secara cepat agar tidak menimbulkan kerugian. Pelaksanaan pengendalian internal dapat dilakukan sebelum, selama dan sesudah terjadinya kegiatan yang tujuannya adalah untuk menguji akurasi dan keandalan data akuntansi dan menjamin efisiensi operasi. Pengendalian akuntansi yang baik akan menjamin keamanan kekayaan para investor dan kreditur yang ditanamkan dalam perusahaan dan akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Ariesta, 2013).

Berdasarkan PP No. 60/2008 Pasal 1 (1) tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Ariesta (2013), pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan atau ketidak-akuratan proses akuntansi sehingga menjadi tidak kompeten. Selain itu menurut Komarasari (2017), pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

Sistem pengendalian internal menekankan pada tindakan pencegahan untuk mengurangi kekeliruan (tidak sengaja) dan ketidakberesan (sengaja), sehingga pelaporan keuangan daerah dapat memenuhi nilai keterandalan karena Laporan Keuangan yang dihasilkan benar dan valid. Pengendalian intern yang lemah menyebabkan tidak dapat terdeteksinya kecurangan/ketidakkuratan proses akuntansi sehingga bukti audit yang diperoleh dari data akuntansi menjadi tidak kompeten (Ariesta, 2013). Pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keterandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dan dipatuhinya kebijakan pimpinan.

Penyimpangan dan kebocoran yang masih ditemukan dalam laporan keuangan, menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut belum memenuhi karakteristik kualitatif keterandalan dan relevansi. Penyebab ketidakandalan laporan keuangan tersebut merupakan masalah yang berhubungan dengan pengendalian intern dalam organisasi (Setiawati dan Sari, 2014). Ketidaktepatan penyajian laporan keuangan juga berkaitan

dengan pengendalian intern yang diterapkan, sehingga akan sulit untuk dipahami dan tidak mampu untuk diperbandingkan.

2.1.5.1 Indikator Pengendalian Internal Akuntansi

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yaitu menurut PP No. 60 Tahun 2008, diantaranya:

1) Lingkungan pengendalian

Lingkungan pengendalian merupakan Tindakan, kebijakan dan prosedur yang mencerminkan sikap pimpinan instansi atau Lembaga tentang pengendalian intern yang dapat menimbulkan kesadaran seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian bagi instansi atau lembaga yang bersangkutan. Pimpinan Instansi Pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

2) Pengendalian risiko

Pengendalian internal harus memberikan penilaian atas risiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam. Penilaian risiko merupakan identitas entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya,

membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.

3) Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan Instansi Pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

4) Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan pihak yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan Instansi Pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggungjawabnya.

5) Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit lainnya dapat segera ditindaklanjuti (PP Nomor 60 Tahun 2008).

Menurut Ariesta (2013), pengendalian internal akuntansi dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

- 1) Sistem akuntansi yang ada
- 2) Dokumen pendukung

- 3) Adanya otorisasi dari pihak yang berwenang
- 4) Adanya pencatatan pembukan
- 5) Adanya pemisahan tugas yang jelas

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang hasilnya dapat digunakan sebagai referensi dan perbandingan dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

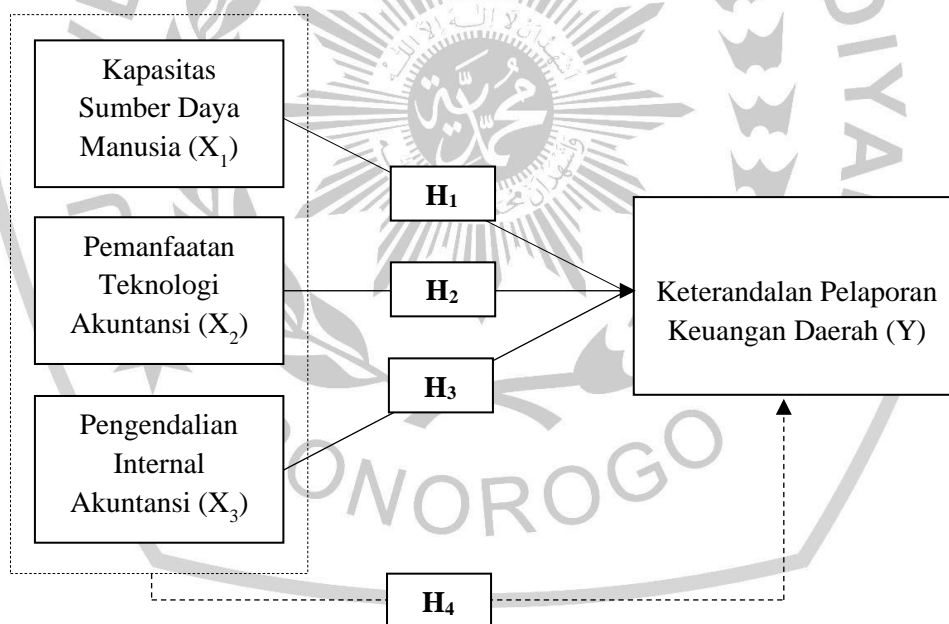
No.	Peneliti	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1	Fadila Ariesta (2013)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Satuan kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat)	X1 = Pengaruh kualitas sumber daya manusia X2 = Pemanfaatan teknologi informasi X3 = pengendalian intern akuntansi Y = Nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah	Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda	a. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. b. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. c. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. d. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. e. Pengendalian intern akuntansi memiliki pengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2	Shinta Permat a Sari dan Banu	Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Daerah Ditinjau dari Sumber Daya	X1 = Sumber daya manusia	Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis	a. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan maupun ketepatanwaktuan pelaporan keuangan daerah.

	Witono (2014)	Manusia, Pengendalian Intenal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	X2 = Pengendalian Intenal X3 = Pemanfaatan Teknologi Informasi Y1 = Keterandalan pelaporan keuangan daerah Y2 = Ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah	adalah analisis regresi linier berganda	b. Pengendalian internal berpengaruh terhadap keterandalan maupun ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah. c. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan maupun ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah.
3	Erma Setiawati dan Shinta Permata Sari (2014)	Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau dari Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dan Pemahaman Akuntansi (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)	X1 = Sumber daya manusia X2 = Pengendalian internal X3 = Pemanfaatan teknologi informasi X4 = Pemahaman akuntansi Y = Kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah	Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda	a. Sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. b. Pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. c. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. d. Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah.
4	Warik Komarasari (2016)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD	X1 = Kapasitas sumber daya manusia X2 = Pemanfaatan teknologi informasi X3 = Pengendalian	Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linier berganda	a. Sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. b. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

		Kabupaten Bantul bagian Akuntansi dan Keuangan)	intern akuntansi Y = Keterandalan pelaporan keuangan daerah		c. Pengendalian intern akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
--	--	---	---	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan tabel diatas, peneliti akan meneliti pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah yang dirumuskan pada kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————▶ : Pengaruh secara parsial

- - - - -▶ : Pengaruh secara serempak

Kerangka pemikiran merupakan gambar yang berisi hubungan antar variabel yang diteliti (Sekaran, 2006). Variabel *independent* atau variabel tidak terikat (X) dalam penelitian ini adalah kapasitas sumber daya manusia (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2) dan pengendalian internal akuntansi (X3). Variabel tidak terikat ini akan diprediksi pengaruhnya terhadap variabel *dependent* atau variabel terikat (Y) yaitu keterandalan pelaporan keuangan daerah baik secara parsial maupun serempak.

2.4 Hipotesis

Mengacu pada penelitian terdahulu dan berdasar pada penjabaran sebelumnya, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah

Menurut Ariesta (2013), apabila sumber daya manusia dalam melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi sehingga informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi memiliki kualitas yang buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi tidak bernilai dan tidak andal.

Penelitian mengenai kapasitas sumber daya manusia terutama dalam pelaksanaan keuangan daerah pernah dilakukan oleh Andriani (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Oleh karena itu jika

kapasitas sumber daya manusia meningkat, maka keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara kapasitas sumber daya manusia terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

H_{a1} : Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

H_{01} : Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah

Menurut Komarasari (2017), pelaporan keuangan yang awalnya menggunakan proses manual dianggap tidak efektif, efisien dan kurang akurat dalam menilai keterandalan suatu pelaporan keuangan karena memiliki resiko terjadi kesalahan yang lebih besar. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satunya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan sehingga pelaporan keuangan akan semakin cepat dan andal.

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelaporan keuangan daerah juga pernah dilakukan oleh Setiawati (2014) dan Fadila (2013) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan. Oleh karena itu jika pemanfaatan teknologi informasi semakin baik dan sistematis, akan meminimalisasi berbagai kesalahan karena dengan teknologi informasi pengelolaan keuangan dilakukan secara lebih sistematis dan mampu menyajikan pelaporan keuangan daerah yang andal.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

Ha₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

H0₂: Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

3. Pengaruh pengendalian internal akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah

Pengendalian internal akuntansi merupakan rencana organisasi dan metode yang memiliki tujuan untuk mengamankan aset pada organisasi serta menguji sejauh mana data-data bisa dipercaya. Pengendalian internal

digunakan untuk memberikan petunjuk tentang hal yang harus dikerjakan dan mendorong untuk menaati kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu jika pengendalian internal akuntansi dijalankan dan ditaati dengan baik, maka pelaporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin andal dan bisa dipercaya (Komarasari, 2017).

Penelitian mengenai pengendalian internal akuntansi dalam pelaksanaan pelaporan keuangan daerah pernah dilakukan oleh Komarasari (2017) dan Sari dan Witono (2014) yang menyatakan bahwa pengendalian internal akuntansi berpengaruh secara signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengendalian internal terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

Ha₃: Pengendalian internal akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

H0₃: Pengendalian internal akuntansi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah.

4. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah

Menurut Ariesta (2013), apabila sumber daya manusia dalam melaksanakan sistem akuntansi tidak memiliki kapasitas dan kualitas yang disyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi sehingga informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi memiliki kualitas yang buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi tidak bernilai dan tidak andal. Menurut Komarasari (2017), pelaporan keuangan yang awalnya menggunakan proses manual dianggap tidak efektif, efisien dan kurang akurat dalam menilai keterandalan suatu pelaporan keuangan karena memiliki resiko terjadi kesalahan yang lebih besar. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah sangat dibutuhkan, teknologi informasi yang salah satunya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam melakukan perhitungan sehingga pelaporan keuangan akan semakin cepat dan andal. Pengendalian internal akuntansi merupakan rencana organisasi dan metode yang memiliki tujuan untuk mengamankan aset pada organisasi serta menguji sejauh mana data-data bisa dipercaya. Pengendalian internal digunakan untuk memberikan petunjuk tentang hal yang harus dikerjakan dan mendorong untuk menaati kebijakan pimpinan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu jika pengendalian internal akuntansi dijalankan dan ditaati dengan baik, maka pelaporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin andal dan bisa dipercaya (Komarasari, 2017).

Berdasarkan uraian tersebut, diduga terdapat hubungan positif antara pengendalian internal terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah sehingga hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

Ha₄: Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah

H0₄: Kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian internal akuntansi tidak berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan daerah

